EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SATKER PUSKEU POLRI TW I T.A. 2024

Jakarta, April 2024

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN I TAHUN 2024

Jakarta, 04 April 2024

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEUANGAN

EVALUASI CAPAIAN KINERJA SATKER PUSKEU POLRI TRIWULAN I TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Visi, Misi dan tujuan yang ditetapkan oleh Puskeu Polri adalah untuk mewujudkan tugas Puskeu Polri dalam menyelenggarakan fungsi keuangan dibidang pelayanan keuangan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan pembinaan Polri maupun untuk mendukung tugas-tugas Polri. Mengacu pada Visi, Misi dan tujuan Puskeu yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Puskeu Polri Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diselaraskan dengan sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang tersedia. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri berdampak pada perubahan Polri secara menyeluruh termasuk reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan reformasi anggaran yang berorientasi pada pengeluaran jangka menengah dilakukan melalui penataan kembali struktur program dan kegiatan di lingkungan Polri. Restrukturisasi program dan kegiatan bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi pada hasil *(outcome)* dan keluaran *(output)* yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penerapan akuntabilitas kinerja Polri dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis Polri Tahun 2020-2024.

B. KEDUDUKAN …..

B. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Tugas

Puskeu Polri bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan manajemen dan administrasi keuangan di lingkungan Polri.

2. Fungsi

a. pelaksana fungsi perencanaan dan evaluasi kebijakan, strategi, anggaran, sumber daya manusia dan pembinaan fungsi dalam lingkungan Puskeu Polri;
b. pengelolaan dan administrasi pelaporan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan Non APBN;
c. perumusan dan/atau pengembangan sistem, metode pedoman akuntansi dan keuangan Polri;
d. pengendalian akan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan;
e. pelaksana verifikasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan keuangan di wilayah;
f. pelaksana fungsi administrasi keuangan untuk Mabes Polri;
g. pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Puskeu Polri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :

1. unsur Pimpinan:

Kapuskeu Polri.

2. unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf:

a. Sekretariat (Set), terdiri dari:
1) Subbagren;
2) Subbagsumda;
3) Subbagbinfung; dan
4) Urtu.

b. Urkeu .....

b. Urkeu.

c. Bidang Pembiayaan (Bidbia), terdiri dari:
   1) Subbidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid APBN);
   2) Subbidang Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Subbid non APBN);
   3) Subbidang Administrasi Laporan (Subbidminlap) dan;
   4) Urmin.

d. Bidang Akuntansi Pelaporan Keuangan (Bid APK), terdiri dari:
   1) Subbidang Sistem Akuntansi (Subbidsisakun);
   2) Subbidang Tata Buku Manual (Subbidtabumanual);
   3) Subbidang Laporan Keuangan (Subbidlapkeu) dan;
   4) Urmin.

e. Bidang Pengendalian (Biddal), terdiri dari:
   1) Subbidang Sistem dan Metoda (Subbidsismet);
   2) Subbidang Pengawasan Anggaran (Subbidwasgar);
   3) Subbidang Informasi (Subbidinfo); dan
   4) Urmin.

f. Bidang Verifikasi (Bidverif), terdiri dari:
   1) Subbidang Verifikasi Wilayah I (Subbidverif Wil I);
   2) Subbidang Verifikasi Wilayah II (Subbidverif Wil II);
   3) Subbidang Verifikasi WilayahIII (Subbidverif Wil III) dan;
   4) Urmin.

g. Bidang Keuangan Mabes (Bidkeu Mabes).

STRUKTUR …..

STRUKTUR ORGANISASI PUSKEU POLRI

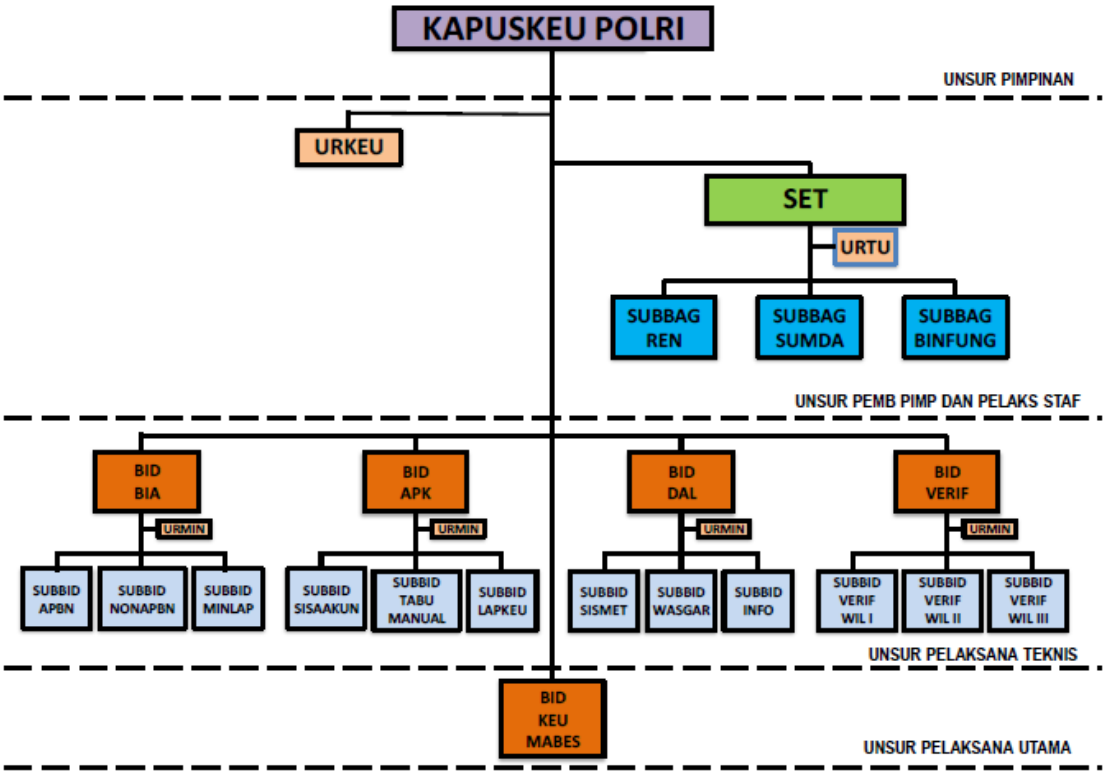

D. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Maksud dibuatnya laporan ini adalah untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan tentang evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan I T.A. 2024.

2. Tujuan

   Adapun tujuannya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan I T.A. 2024 ini adalah agar capaian kinerja, daya serap anggaran dapat lebih optimal

E. DASAR

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga;

2. Keputusan …..

2. Keputusan Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: Kep/22/XI/2021 tanggal 3 November 2021 tentang Renstra Strategis Pusat Keuangan Polri Tahun 2020 – 2024;
3. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satker Puskeu Polri T.A. 2024 Nomor : SP DIPA- 060.01.1.642381/2024 tanggal 24 November 2023
4. Nota Dinas Kepala Pusat Keuangan Polri Nomor: B/ND-437/IV/REN.3.1./2024/Puskeu tanggal 5 April 2024 perihal permintaan data evaluasi capaian kinerja Triwulan I T.A. 2024;

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembuatan laporan ini adalah evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri Triwulan I T.A. 2024.

G. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap IKU Penunjang Polri

1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) atas Laporan Keuangan Polri.
   a. Membandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Opini BPK atas Laporan Keuangan T.A. 2023.	WTP	LK Polri *Unaudited* T.A. 2023	Belum menyatakan Opini

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi

Anggaran .....

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 30 ayat (2).

Penyusunan Laporan Keuangan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan penyusunan keuangan disusun dan disajikan dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan Keuangan Negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 9 huruf (g). Untuk mewujudkan Laporan Keuangan Polri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi data untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan perkembangan proses bisnis pengelolaan keuangan negara, evaluasi atas pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat, dan penerapan sistem aplikasi terintegrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Perubahan penerapan akuntansi dari berbasis kas menjadi berbasis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari reformasi dibidang keuangan negara yang dilaksanakan secara bertahap, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Puskeu Polri pada tahun 2024 bertekad mempertahankan

opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan indikator atas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta merupakan apresiasi terhadap seluruh Laporan Keuangan Satker di lingkungan Polri yang diwadahi dalam keuangan Polri.

Apabila …..

Apabila dibandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2024, Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan untuk Laporan Keuangan Polri (LK) Tahun 2023 belum mencapai target. Hal ini dikarenakan sesuai dengan pasal 20 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyampaian Opini dari BPK RI atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2023 baru akan disampaikan pada bulan Mei 2024. Pada Triwulan I T.A. 2024 ini capaian Indikator Kinerja Utama Opini BPK RI atas Laporan Keuangan sudah terealisasi sampai dengan tahap penyampaian Laporan Keuangan Polri *Unaudited* T.A. 2023.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

TREND KINERJA OPINI BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN POLRI

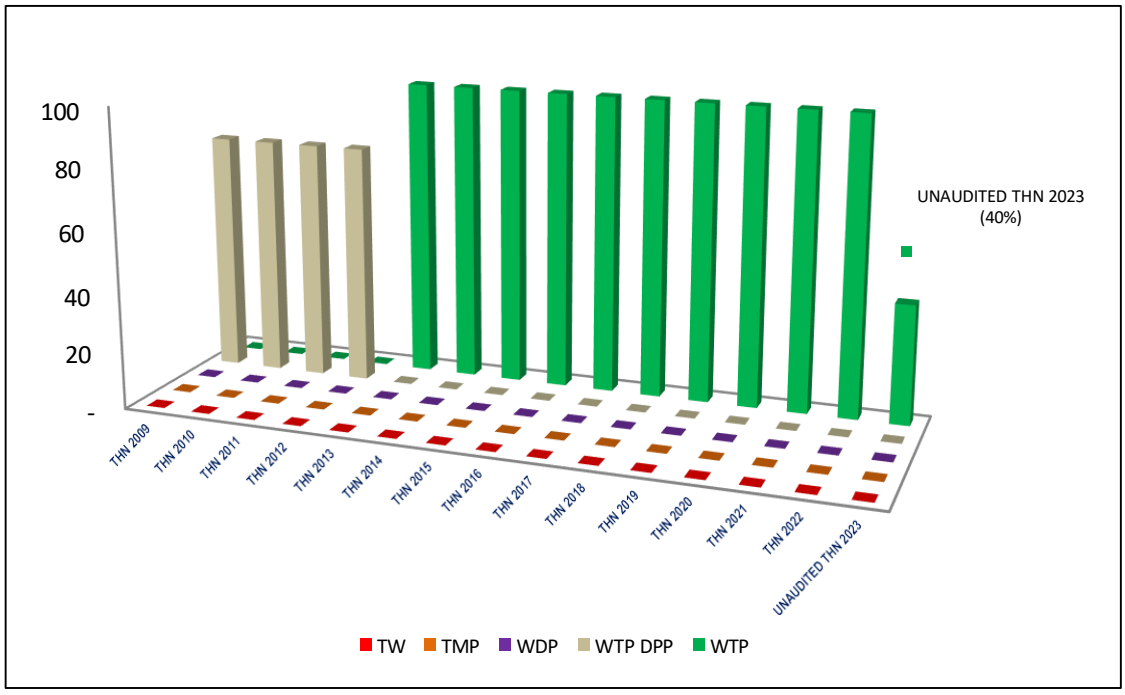

Laporan keuangan Polri selama 10 tahun berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 2022 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal ini bukanlah tugas yang mudah, namun .....

namun merupakan target yang harus dicapai oleh polri sekaligus merupakan komitmen Polri untuk mewujudkan clean government bidang pengelolaan keuangan negara. Capaian ini bukan berarti bahwa Pengelolaan Keuangan Negara di Lingkungan Polri terbebas dari objek pemeriksaan BPK. Masih terdapat isu yang akan mempengaruhi Laporan Keuangan Polri T.A. 2023 untuk menindak lanjuti Laporan Keuangan Polri Unaudited T.A. 2023 dan sesuai kesepakatan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) R.I.

Komunikasi intensif dan berkelanjutan sangat menentukan derajat kualitas data yang dihasilkan dari proses rekonsiliasi data pada Laporan Keuangan. Komunikasi yang dilakukan oleh Pusat Keuangan Polri begitu luas mencakup banyak pihak yakni mulai dari 36 Bidkeu Polda / Bidkeu Mabes dan pihak Kemenkeu RI sebagai narasumber utama. Diharapkan dengan komunikasi yang baik maka dapat dihasilkan Laporan Keuangan yang akuntabel sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki kinerja keuangan kedepannya.

Kegiatan penyusunan Laporan Keuangan Polri T.A. 2023 Unaudited diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi Pengelolaan Keuangan Negara. Disamping itu laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan selaras dengan program simplifikasi regulasi.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja Triwulan I tahun 2024 dengan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2023 pada Indikator Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan, maka realisasi kinerja tidak mengalami perubahan dimana pada Triwulan I tahun 2024 BPK belum menyatakan Opini (LK Polri Unaudited). Belum disampaikannya Opini dari BPK dapat dijelaskan sebagai berikut:

Waktu ….

WAKTU PENGUKURAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN POLRI

NO	URAIAN	BULAN PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semester Tahun Anggaran Berjalan (TAB)	Juli TAB	Laporan Keuangan Semester I
2	Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) TAB	September TAB	PDTT BPK
3	Penyusunan Laporan Keuangan TRIWULAN III TAB	Oktober TAB	Laporan Keuangan TRIWULAN III
4	Interim	November TAB	BPK
5	Penyusunan Laporan Tahunan TAB	Februari TAB+1	Laporan Keuangan Unaudited
6	Rekonsiliasi data antara BPK, Kemenkeu dan Polri	April TAB+1	*Tripartied*
7	Penyusunan Laporan Keuangan Polri Perbaikan	Mei TAB+1	Laporan Keuangan Audited
8	Penentuan Opini	Mei TAB+1	BPK

c. Analisa efesiensi penggunaan sumber daya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan beberapa pihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, pengunaan tenaga ahli dari internal maupun *Stakeholder* sebagai narasumber dan tim *Reviu.* Untuk mendukung pelaksanaan langkah-langkah percepatan pelaksanaan anggaran dan mengoptimalkan capaian indikator kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan tahun 2023 pada Triwulan I tahun 2024 perlu adanya dukungan dari beberapa faktor yang cukup berperan yaitu sebagai berikut :

1) Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan;
2) Koordinasi antara fungsi perencanaan (Asrena Kapolri), penguasaan (Slog Polri), pengawasan (Itwasum Polri) dan pelaksana / penanggungjawab kegiatan (KPA);

3) Dukungan …..

3) Dukungan sarana prasarana yang telah terintegrasi dengan *stakeholder*;
4) Dukungan alokasi ketersediaan anggaran yang cukup dalam mendukung penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri.

Berdasarkan empat faktor pendukung di atas, untuk terus mempertahankan Opini WTP dari BPK RI sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Satker Puskeu Polri tahun 2020-2024 maka dalam pelaksanaan Renstra Puskeu Polri tahun ke tiga perlu adanya penambahan alokasi anggaran untuk mendukung peningkatan kemampuan personel jajaran keuangan, penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan Polri serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung sehingga target pada Renstra Satker Puskeu Polri Tahun 2020-2024 dapat tercapai secara optimal.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum pencapaian kinerja pada Indikator Kinerja Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Polri Tahun 2022 sampai dengan Triwulan I tahun 2024 ini terealisasi sampai dengan tahap penyampaian Laporan Keuangan Polri *Unaudited* T.A. 2022 kepada kemenkeu RI, keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan yaitu adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari penanggungjawab kegiatan untukmerealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2024;

1) Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai;
2) Telah diimplementasikannya pengangaran yang berbasis kinerja, dimana setiap kegiatan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu;
3) Dilaksanakannya rapat evaluasi setiap Triwulan terkait capaian kinerja, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.

Sementara …..

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan sebagai berikut:

1) Adanya program/kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung penyajian dan penyusunan laporan keuangan Polri;
2) Adanya koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi Pengawasan, fungsi Perencanaan, fungsi Logistik, fungsi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggungjawab tatakelola keuangan tingkat Satker.

Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang harus dilakukan, masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Satker dari hasil pemeriksaan data Laporan Keuangan dan terdapat beberapa temuan pada Laporan Keuangan T.A. 2023 Unaudited yang harus di tindak lanjuti agar tidak terulang kembali sebagai berikut:

1) Polda Sulawesi Barat, Piutang TP/TGR sementara di nihilkan dikarenakan terdapat kesalahan dalam mencatat piutang yaitu pencatatan piutang pada modul piutang dicatat setiap bulan, seharusnya piutang tersebut dicatat satu kali saja dengan nilai piutang secara akumulatif sesuai skep pembebanan, tindak lanjut temuan tersebut akan di perbaiki di Periode 14 (Audited) yang mana sisa piutangnya senilai Rp4.744.334,-;
2) Polda Papua, pada Polres Kepulauan Yapen dan Polres Jayapura belum melakukan pengesahan hibah dan terdapat 4 Satuan Kerja yang belum menyertakan Surat Pernyataan Hibah
3) Polda Aceh, terdapat 3 Satuan Kerja yang belum menyertakan Surat Pernyataan Hibah
4) Sampai saat ini data masih berubah-ubah sampai dengan Puskeu memerintahkan tutup buku permanen di periode bulan 13;
5) Terdapat 10 Polda belum mengumpulkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), 26 Polda yang telah meng*upload* CaLK pada *linktree* adalah sebagai berikut:
   (a) Polda Aceh (Perbaikan);
   (b) Polda Bali (Perbaikan);
   (c) Polda Banten (Perbaikan);

(d) Polda .....

(d) Polda Bengkulu (Perbaikan);
(e) Polda DIY (Perbaikan);
(f) Polda Gorontalo (Perbaikan);
(g) Polda Jabar (Perbaikan);
(h) Polda Jambi (Pemeriksaan);
(i) Polda Jateng (Perbaikan);
(j) Polda Jatim (Perbaikan);
(k) Polda Kalbar (Perbaikan);
(l) Polda Kalsel (Pemeriksaan);
(m) Polda Kalteng (Perbaikan);
(n) Polda Kepri (Pemeriksaan);
(o) Polda Lampung (Perbaikan);
(p) Polda Metro Jaya (Perbaikan);
(q) Polda Ntt (Perbaikan);
(r) Polda Pabar (Perbaikan);
(s) Polda Riau (Perbaikan);
(t) Polda Sulsel (Perbaikan);
(u) Polda Sulteng (Perbaikan);
(v) Polda Sultra (Perbaikan);
(w) Polda Sulut (Perbaikan);
(x) Polda Sumbar (Perbaikan);
(y) Polda Sumsel (Pemeriksaan); dan
(z) Polda Sumut (Perbaikan).

Berdasarkan hal tersebut untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Polri hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1) Para Kabidkeu dan operator agar berperan aktif dalam mengikuti setiap perkembangan perubahan regulasi dan aplikasi yang selalu disempurnakan oleh Kementerian Keuangan di dalam Penyusunan Pelaporan Keuangan;
2) Pastikan permasalahan pada laporan keuangan sebelumnya telah di tindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dan tidak terjadi temuan permasalahan berulang pada Laporan Keuangan berikutnya;

3) Tingkatkan .....

3) Tingkatkan koordinasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Bank Pemerintah serta instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dengan melalui peningkatan kinerja dan pelayanan di bidang Keuangan;
4) Tingkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam peningkatan kinerja dan meningkatkan mutu Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Puskeu Polri sebagai Pembina Fungsi keuangan wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip *Good Governance*.

Program Dukungan Manajemen adalah merupakan salah satu program yang terdapat pada Satker Puskeu Polri, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068) yang diemban oleh Kapuskeu Polri. Dengan kegiatan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dan Bidkeu Polda sebagai pengemban fungsi administrasi keuangan Polri dapat terakomodir sehingga pengelolaan keuangan negara di jajaran keuangan Polri terlaksana secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempertahankan Laporan Keuangan Polri dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

a. Membandingkan antara target kinerja tahun 2024 dan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2024.

Indikator …..

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi Triwulan I
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94,25	72,99

Sumber data: OM Span tanggal cetak : 21-03-23 04:38:57 oleh : KL060

Pada Triwulan I Tahun 2024 nilai sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri sebesar 72,99 Apabila dibandingkan antara target kinerja tahun 2024 sebesar 94,25 maka realisasi sebesar 22,55% (belum dapat dikatakan tercapai), hal ini dikarenakan sampai dengan bulan Maret T.A. 2024 Nilai IKPA belum memperhitungkan capaian *output* sehingga berpengaruh kepada nilai akhir. Hal ini terjadi karena saat ini sedang dilakukan pengembangan *system* pada OMSPAN sehingga untuk sementara waktu belum dibuka perekaman capaian *output*, namun demikian bukan berarti nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri tidak tercapai realisasi pada Triwulan I Tahun 2024 merupakan nilai kinerja anggaran yang sifatnya sementara sedangkan target capaian nilai kinerja anggaran merupakan nilai akhir pada tahun anggaran berjalan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KL	Nama KL	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
				Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	Nilai	100.00	82.70	100.00	99.09	99.55	98.59	100.00	0.00	72.99	100%	72.99
			Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
			Nilai Akhir	10.00	8.27	20.00	9.91	9.96	9.86	5.00	0.00			
			Nilai Aspek	91.35		99.45					0.00			

b. Membandingkan antara realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir.

Indikator …..

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023	Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2024
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	72,86	72,99

Pada Triwulan I Tahun 2024 nilai sementara Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri sebesar 72,99 Apabila dibandingkan dengan realisasi target kinerja Triwulan I Tahun 2023 sebesar 72,86 maka realisasi Triwulan I Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,17%, capaian ini sama-sama belum memperhitungkan Capaian *Output* sehingga berpengaruh kepada nilai akhir.

PERBANDINGAN NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) NASIONAL DAN POLRI TAHUN 2019 S.D. 2023

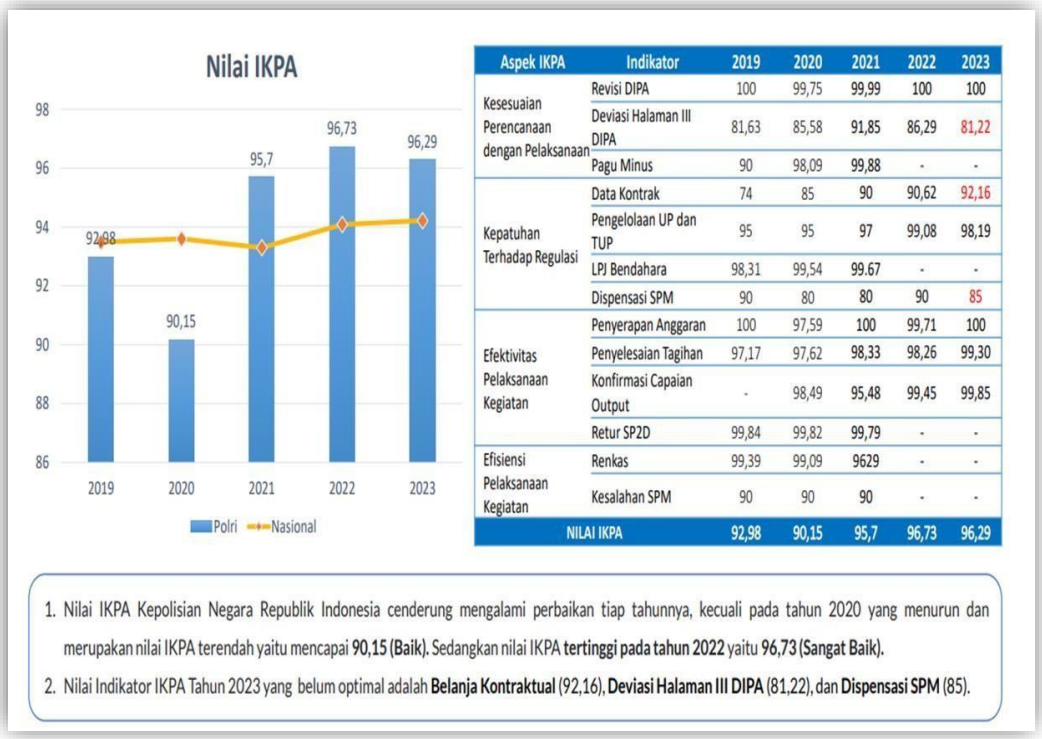

Aspek IKPA	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan	Revisi DIPA	100	99,75	99,99	100	100
	Deviasi Halaman III DIPA	81,63	85,58	91,85	86,29	81,22
	Pagu Minus	90	98,09	99,88	-	-
Kepatuhan Terhadap Regulasi	Data Kontrak	74	85	90	90,62	92,16
	Pengelolaan UP dan TUP	95	95	97	99,08	98,19
	LPJ Bendahara	98,31	99,54	99.67	-	-
	Dispensasi SPM	90	80	80	90	85
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	Penyerapan Anggaran	100	97,59	100	99,71	100
	Penyelesaian Tagihan	97,17	97,62	98,33	98,26	99,30
	Konfirmasi Capaian Output	-	98,49	95,48	99,45	99,85
	Retur SP2D	99,84	99,82	99,79	-	-
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan	Renkas	99,39	99,09	9629	-	-
	Kesalahan SPM	90	90	90	-	-
NILAI IKPA		92,98	90,15	95,7	96,73	96,29

1. Nilai IKPA Kepolisian Negara Republik Indonesia cenderung mengalami perbaikan tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang menurun dan merupakan nilai IKPA terendah yaitu mencapai **90,15 (Baik)**. Sedangkan nilai IKPA **tertinggi pada tahun 2022** yaitu **96,73 (Sangat Baik)**.
2. Nilai Indikator IKPA Tahun 2023 yang belum optimal adalah **Belanja Kontraktual** (92,16), **Deviasi Halaman III DIPA** (81,22), dan **Dispensasi SPM** (85).

Dari Grafik perbandingan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Nilai IKPA Polri cenderung mengalami perbaikan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang merupakan nilai terendah yaitu 90,15;

2) Nilai .....

2) Nilai IKPA Polri tahun 2019 dibawah nilai IKPA Nasional namun selisihnya tidak begitu jauh;
3) Nilai IKPA Polri tahun 2020 jauh dibawah nilai IKPA Nasional;
4) Nilai IKPA Polri tahun 2021-2022 mengalami kenaikan cukup tinggi dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan pembobotan nilai IKPA sebagai berikut:

c. Analisa efesiensi penggunaan sumber daya

Keberhasilan capaian indikator nilai kinerja anggaran ini didukung oleh beberapa faktor yang cukup berperan dalam pencapaian masing masing indikator kinerja sasaran, diantaranya kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai dan telah terintegrasi dengan *stakeholder, sosialisasi, monitoring dan evaluasi* serta alokasi anggaran yang cukup memadai.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sesuai .....

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian nilai kinerja anggaran. Hal ini dikarenaka n nilai kinerja anggaran juga berpengaruh terhadap opini yang disampaikan BPK RI atas Laporan Keuangan Polri dan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien.

Program Dukungan Manajemen adalah merupakan salah satu program yang terdapat pada Satker Puskeu Polri, dimana di dalamnya terdapat kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068) yang diemban oleh Kapuskeu Polri. Dengan kegiatan ini, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskeu Polri dan Bidkeu Polda sebagai pengemban fungsi administrasi keuangan Polri dapat terakomodir.

Ketertiban Satker dalam pengelolaan uang persediaan, memasukkan data kontrak tepat waktu, menghindari kesalahan dalam membuat Surat Perintah Membayar (SPM), menghindari Retur SP2D, melaksanakan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah di tetapkan dalam Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA), menghindari/meminimalisir revisi DIPA, penyelesaian tagihan tepat waktu, penyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara, membuat perencanaan kas yang baik dan realisasi anggaran yang tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan Satker serta melakukan pelaporan capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan merupakan faktor penunjang dalam keberhasilan pencapaian target pada Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Untuk dapat mencapai target Nilai Kinerja Anggaran pada akhir tahun diharapkan Satker Mabes dan kewilayahan dapat mempedomani langkah-langkah sebagai berikut :

LANGKAH …..

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PENINGKATAN IKPA

No	Indikator	Langkah Peningkatan
1	Revisi DIPA	Untuk mempertahankan capaian ini maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap). Selain itu, Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 Triwulan.
2	Halaman III DIPA	Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh Satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan. Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.
3	Pengelolaan UP	Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini maka seluruh Satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.
4	Penyampaian Data Kontrak	Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.
5	Penyelesaian Tagihan	Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling

No …..

No	Indikator	Langkah Peningkatan
		lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, Satker agar teliti, lengkap dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.
6	Penyerapan Anggaran	Untuk mempertahankan capaian ini maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif. Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
7	Dispensasi SPM	Satker agar senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun.
8	Konfirmasi Capaian Output	a) Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan; b) Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola; c) Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya); Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SAS dan SAKTI secara disiplin setiap bulan.

H. Capaian …..

H. Capaian Kinerja Satker Puskeu Polri terhadap Perjanjian Kinerja Satker Puskeu Polri.

1. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

a. Meningkatkan kapasitas jajaran keuangan dalam pengelolaan Keuangan Negara;

1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA ≥ 93,5	79%	-	-

Pencapaian target jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA ≥ 93,5 belum tercapai, hal ini dikarenakan :

a) Saat ini Dit SITP Dirjen Perbendaharaan sedang melaksanakan pengembangan sistem OMSPAN sehingga periode perekaman data Capaian Output TW I T.A. 2024 baru dimulai di bulan Maret 2024;

b) Periode pengisian dan pelaporan realisasi kinerja Capaian Output TW I T.A. 2024 pada SAKTI dilakukan secara terpusat dimulai tanggal 1 Maret 2024, sampai dengan 30 April 2024 sehingga data Capaian Output belum dapat dilaksanakan penilaian;

c) Laporan belum dapat dibuat karena data IKPA TW I T.A. 2024 baru dapat dinilai setelah tanggal 30 April 2024.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW I T.A. 2023	Realisasi TW I T.A. 2024	Capaian
Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA ≥ 93,5	-	-	-

Jika …..

Jika dibandingkan Pencapaian target meningkatkan Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA ≥ 93,5 pada TW I T.A. 2023 dan T.A. 2024 belum tercapai, hal ini dikarenakan data Capaian Output belum dapat dilaksanakan pada penilaian IKPA di awal tahun, namun demikian Puskeu Polri telah melakukan upaya dengan melaksanakan Kegiatan Monev IKPA Polri T.A. 2024 yang diikuti oleh 34 Bidkeu Polda dan 66 Satker agar target capaian pada T.A. 2024 dapat tercapai.

b. Menjamin kelancaran penyelenggaraan administrasi dan evaluasi pembiayaan.

1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri	100%	25%	25%

Capaian Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan bidang pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri TW I sebesar 25%, hal ini sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan per Triwulan. Setiap Triwulan Bidang pembiayaan menyerahkan Laporan Administrasi Keuangan Bidang Pembiayaan (Tunkin, Kontijensi, PLN, PDN, FPU) untuk kemudian dilakukan rekonsiliasi dengan Bid APK untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Polri.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW I T.A.2023	Realisasi TW I T.A.2024	Capaian
Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri	25%	25%	100%

Apabila dibandingkan antara Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan bidang pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri TW I T.A. 2023 dengan TW I T.A. 2024 sebesar 25% maka realisasi tidak mengalami perubahan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada setiap triwulan.

c. Menjamin kelancaran penyelenggaraan verifikasi terhadap Dokumen Perwabkeu.

1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Bidkeu Polda dan mabes yang mendapatkan (NPHPW) oleh Puskeu Polri	36 Bidkeu Polda dan Mabes	-	-

Indikator Kinerja jumlah Bidkeu Polda Mabes yang mendapatkan Nota Hasil Pemeriksaan Perwabkeu (NPHPW) oleh Puskeu Polri dari target 36 Bidkeu Polda dan Mabes sampai dengan TW I T.A.2024 belum ada realisasi, pekerjaan kegiatan pada Satker pelaksana belum selesai/belum sampai pelunasan.

2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW I T.A. 2023	Realisasi TW I T.A. 2024	Capaian
Jumlah Bidkeu Polda dan mabes yang mendapatkan (NPHPW) oleh Puskeu Polri	-	-	-

Realisasi…..

Realisasi Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota Hasil Pemeriksaan Perwabkeu (NPHPW) oleh Puskeu Polri apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada TW I Tahun 2023 dan TW I 2024 belum tercapai, karena pelaksanaan kegiatan masih berjalan, sehingga NPHPW belum bisa diterbitkan.

d. Menyajikan Laporan Keuangan yang profesional, transparan, akuntabel dan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

1) Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	80%	80%

Persentase rekomendasi BPK RI atas laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti dengan penanggung jawab Bid APK target T.A. 2024 sebesar 100%, dan realisasi s.d. TW I T.A. 2024 tercapai sebesar 80%, dikarenakan penyusunan Laporan keuangan Polri yang melibatkan Bidkeu Polda dan Mabes masih dalam proses pelaksanaan, sehingga hasil pemeriksaan terinci BPK RI pada LK tahun 2023 masih berlangsung sesuai Surat Kapolri Nomor: B/489/I/WAS.2.1./ 2024/Itwasum tanggal 15 Januari 2024

2) Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2024 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW I T.A. 2023	Realisasi TW I T.A. 2024	Capaian
Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	80%	80%	100%

Jika …..

Jika dibandingkan Pencapaian target Persentase rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti pada TW I T.A. 2023 dan TW I T.A. 2024 sebesar 80% hal ini dikarenakan rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Polri belum dapat diterbitkan karena kegiatan penyusunan dan penyajian laporan keuangan Polri baru akan dilaksanakan di bulan januari s.d. April tahun 2024.

2. Monitoring dan evaluasi atas indikator efektifitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi dalam kinerja pelaksanaan anggaran.

   a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Puskeu	93,00	73,21	78,73%

Target Kinerja IKPA Tahun 2024 adalah 93,00 dan realisasi Triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 73,21. Target tersebut merupakan target tahunan tidak dapat diukur secara per triwulan.

   b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

REALISASI KINERJA NILAI IKPA PUSKEU POLRI TW I TAHUN 2024

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	088	060	642381	PUSKEU POLRI	Nilai	100.00	82.35	100.00	100.00	100.00	99.73	100.00	0.00	73.21	100%	73.21
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.24	20.00	10.00	10.00	9.97	5.00	0.00			
					Nilai Aspek	91.18		99.95					0.00			

REALISASI …..

REALISASI KINERJA NILAI IKPA PUSKEU POLRI TW I TAHUN 2023

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : MARET

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	088	060	642381	PUSKEU POLRI	Nilai	100.00	42.73	100.00	100.00	100.00	99.99	100.00	56.57	83.41	100%	83.41
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	4.27	20.00	10.00	10.00	10.00	5.00	14.14			
					Nilai Aspek	71.37		100.00					56.57			

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai IKPA Satker Puskeu Polri TW I T.A. 2024 lebih rendah dibandingkan dengan nilai IKPA Satker Puskeu Polri TW I Tahun 2023, hal ini disebabkan karena pada T.A. 2024 belum ada penilaian pada Indikator capaian Output belum ada penilaian Namun demikian capaian Triwulan I Tahun 2024 sifatnya sementara dikarenakan target capaian nilai kinerja anggaran merupakan nilai akhir pada tahun anggaran berjalan.

3. Monitoring dan evaluasi atas Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu Polri

a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu	74,50	-	-

Target Kinerja nilai AKIP Puskeu Polri sebesar 74,50 sampai dengan TW I tahun 2024 belum terealisasi hal ini dikarenakan Belum ada penilaian dari tim evaluator APIP.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2022 dengan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	Realisasi TW I T.A. 2023	Realisasi TW I T.A. 2024	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu.	-	-	-

Jika …..

Jika dibandingkan Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Puskeu antara TW I tahun 2023 dan TW I tahun 2024 sama-sama belum ada realisasi, hal ini dikarenakan Belum ada penilaian dari tim evaluator APIP evaluasi baru akan dilaksanakan pada bulan Mei T.A. 2024.

4. Peningkatan Profesionalisme SDM bidang Keuangan

a. Membandingkan antara target kinerja Tahun 2024 dan realisasi kinerja TW I Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara	94%	-	-

Target kinerja persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara sebesar 94% sampai dengan TW I tahun 2024 belum terealisasi, hal ini dikarenakan Belum adanya jadwal dari Pusdiklat AP Kemenkeu RI terkait pelaksanaan Diklat Bendahara di lingkungan Polri.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja TW I Tahun 2023 dengan realisasi kinerja TW I Tahun 2024.

Indikator Kinerja Utama	**Realisasi TW I T.A. 2023**	**Realisasi TW I T.A. 2024**	**Capaian**
Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi bendahara .	-	-	-

Jika dibandingkan Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara antara TW I tahun 2023 dan TW I tahun 2024 belum ada realisasi, kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada TW II dan saat ini masih dilaksanakan pendataan peserta pada jajaran Bidkeu Polda dan Mabes berkoordinasi dengan kabidkeu Polda jajaran.

c. Analisa efesiensi penggunaan sumber daya

Guna …..

Guna menjaga tata kelola keuangan dan meningkatkan penilaian terkait dengan indikator IKPA serta meningkatkan kinerja Satker sehingga hasil atau output-nya semakin maksimal ada beberapa faktor yang mendukung kebehasilan dalam pencapaian target Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran antara lain :

1) kemampuan sumber daya manusia;
2) Sarana prasarana yang memadai dan telah terintegrasi dengan *stakeholder;*
3) ketersediaan anggaran yang cukup.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Puskeu Polri sebagai pembina fungsi keuangan wajib mengelola Keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta merupakan hal yang menjadi prioritas utama maupun menjadi kemampuan dasar bagi pengelola keuangan di Lingkungan Polri untuk mewujudkan prinsip Good Governance. Progam Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Polri adalah merupakan salah satu program generik pada Polri yang di dalamnya terdapat 7 kegiatan, dan salah satu kegiatan yaitu Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068). Diharapkan seluruh kegiatan para pengemban fungsi administrasi keuangan Polri dapat diakomodir dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri pada Tahun Anggaran 2020-2024 sehingga upaya dalam meningkatkan nilai kinerja anggaran dapat terwujud.

H. Target Capaian Kinerja

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme pada Satker Puskeu Polri maka disusun target kinerja berdasarkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No .....

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi TW I Tahun 2024	%
1	Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	Persentase jumlah Satker Polri dengan nilai IKPA ≥ 93,5	79%	-	-
		Jumlah Bidkeu Polda dan Mabes yang mendapatkan Nota hasil Pemeriksaan Perwabkeu (NHPW) oleh Puskeu Polri	36 Bidkeu polda dan Mabes	-	-
2	Terselenggaranya pengelolaan keuangan Polri yang Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian antara laporan administrasi keuangan Bidang Pembiayaan dengan Laporan Keuangan Polri;	100%	25%	25%
		Persentase rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Satker Polri yang telah di tindaklanjuti	100%	80%	80%
3	Kelembagaan yang Akuntabel dan SDM yang Presisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)Puskeu Polri	74,50	-	-
		Nilai Kinerja Pelaksana Anggaran Puskeu	93,00	73,21	78,73%
		Persentase SDM fungsi keuangan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi Bendahara .	94%	-	-

I. PENUTUP

Demikian pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Satker Puskeu Polri TW I T.A. 2024 disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi.

KEPALA PUSAT KEUANGAN POLRI

Ditandatangani secara elektronik

LUKAS AKBAR ABRIARI, S.I.K., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI